

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA
(STUDI KASUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAJO)**

***THE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT IN YOUTH EMPOWERMENT :
A CASE STUDY IN YOUTH AND SPORT DEPARTMENT OF WAJO
REGENCY)***

ANDI PARIRUDDIN BUR



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019



**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEMUDA (STUDI KASUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WAJO)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ANDI PARIRUDDIN BUR

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



TESIS

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA (STUDI KASUS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAJO)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI PARIRUDDIN BUR
Nomor Pokok P0205216021

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 25 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si
Ketua



Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah,



Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Pariruddin Bur

Nomor Pokok Mahasiswa : P0205216021

Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019

Yang menyatakan,:

Andi Pariruddin Bur



PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak rahmat, hidayah, dan taufiqnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pemuda (Studi Kasus Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo)” dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, serta bantuan dari pihak maka Karya Ilmiah ini akan sulit terselesaikan, Oleh sebab itu, penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS.

Selaku komisi penasehat penulisan Tesis yang begitu baik hati untuk memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan, petunjuk, untuk menyempurnakan Tesis ini.

2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, Prof. Dr. Rahmatiah, MA, Dr. Badu Ahmad, M.Si selaku dosen penguji.

3. Kedua Orang Tua tercinta Drs. Andi Burhanuddin R. M.Si dan Hj. Andi Halidah, S.Pd. karena atas dukungan serta doa mereka yang memberikan semangat dan motivasi diri demi membahagiakan dan membanggakan mereka.



4. Pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo. Drs. Fachruddin, M.Si Sebagai Kepala Dinas, serta Kepala Bagian Pemberdayaan Pemuda, Bapak Andi Ridha. Yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Sahabat – sahabat pengurus KNPI Kabupaten Wajo periode 2017 – 2020 yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Rekan – rekan pengurus HIPMI Kabupaten Wajo yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Saudara seperjuangan Forum Beasiswa KEMENPORA Angkatan 2016. Terima Kasih atas persahabatan dan kebaikan yang telah diberikan.
8. Seluruh pihak dan teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas saran dan kritiknya. Semoga bantuan, dukungan serta semua amal kebbaikannya menjadi balasan yang sewajarnya dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya, penulis persembahkan Tesis ini semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembacanya tentang pemberdayaan pemuda dan menambah pengetahuan dibidang kepemudaan dan pengembangan wilayah

Makassar, 25 Januari 2019

Andi Pariruddin Bur



ABSTRAK

ANDI PARIRUDDIN BUR. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda: Studi Kasus Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo* (dibimbing oleh Baharuddin dan Hazairin Zubair).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan pemuda (studi kasus Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari informan yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian dengan metode wawancara mendalam, diolah, direduksi kemudian disajikan hingga disimpulkan.

Penelitian ini menemukan bentuk strategi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, yaitu penataan, penguatan organisasi dengan manajemen SDM aparatur dan penyempurnaan sistem pelayanan, dan menjalin hubungan serta melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan, dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi, dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi faktor pendukung ialah UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Musrebang, dan Potensi Pemuda, sedangkan faktor penghambat ialah keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo.

Kata kunci: strategi, pemberdayaan pemuda, Kabupaten Wajo



ABSTRACT

ANDI PARIRUDDIN BUR. *The Strategy of Local Government in Youth Empowerment : A Case Study in Youth and Sport Department of Wajo Regency* (supervised by **Baharuddin** and **Hazairin Zubair**)

The aim of this research is to describe the strategy of local government in empowering youth and determine the supporting and inhibiting factors in empowering youth.

This research was conducted in Wajo Regency using descriptive qualitative method. The data were obtained from informants through in-depth interview. They were processed, reduced, presented, and concluded.

The results of the analysis indicate that the strategies used by the local government of Wajo Regency are management, the strengthening of organization with human resource apparatuses, the improvement of service system, the establishment of relationship and involvement of youth and youth organization in activities, and the increase of youth empowerment through support, opportunity, training, and assistance, so they have capability to be entrepreneurial, productive, accomplished, and responsible. Meanwhile, the supporting factors are Law No. 40 Year 2009 on Youth, planning and development deliberations (musrembang), and youth potency, while the inhibiting factors are the limitation of budget and human resources in Youth and Sport Department of Wajo Regency. Therefore, various obstacles are the parts of benchmarks and the success of a program is determined by the purpose of the appropriate empowerment program for the target of the program.

Key words: strategy, youth empowerment, Wajo Regency



Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I .1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah	9
C. TujuanPenelitian	10
D. KegunaanPenelitian	10
BAB II	11
TINJUAN PUSTAKA.....	11
TinjauanTeoridanKonsep	11
Tinjauan Pembangunan Wilayah danKebijakanPemberdayaa	11
a. Pengertian Pembangunan Wilayah.....	13



b. Kebijakan Pemberdayaan	20
c. Pengertian Pemeberdayaan.....	20
d. Arahdan Kebijakan Undang-Undang Pemberdayaan Kepemudaan.....	26
2. Tinjauan Pemberdayaan Pemuda	32
a. Pengertian Pemuda dan Kondisi Umum Pemuda	32
b. Isu-Isu Strategis Pemberdayaan Pemuda.....	34
3. Tinjauan Manajemen Strategik	36
a. Pengertian Strategik.....	36
b. Analisis SWOT	38
B. Tinjauan Empiris	39
C. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Informan Peneliti	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Geografis	50



2. Kependudukan	52
3. Pendidikan	54
4. Ketenagakerjaan	57
B. DinasKepemudaan Dan OlahragaKabupatenWajo	59
1. VisiMisi.....	59
2. Tugas Dan FungsiDinasKepemudaan Dan OlahragaKab.Wajo.....	62
3. Tujuan Dan SasaranJangkaMenengahDinasKepemudaan Dan OlahragaKab. Wajo.....	69
a. TujuanRenstra SKPD	69
b. SasarandanIndikatorSasaranRenstra SKPD	70
4. SumberDayaManusiaDinasKepemudaan Dan OlahragaKab.Wajo	72
a. SumberDayaManusia (Aparatur).....	72
b. SumberDayaSaranadanPrasarana	72
C. StrategiDinasKepemudaandanOlahragaKabupatenWajo dalamPemberdayaanPemuda	76
D. FaktorPendukungdanPenghambatDalamImplementasi StrategiPemberdayaanPemuda.....	86
1. FaktorPendukung.....	87
a. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009.....	87
b. Musrembang.....	89
c. PotensiPemuda.....	90
FaktorPenghambat.....	92
a. KeterbatasanAnggaran	92



b. SumberDayaManusia di DinasKepemudaandanOlahraga	94
c. KesadaranPemuda	95
d. KoordinasiOrganisasiKepemudaandenganDinas KepemudaandanOlahragaKabupatenWajo	97
BAB V	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	54
Tabel2 :	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	55
Tabel 3:	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan	56
Tabel 4:	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat, dan Esalon.....	73
Tabel5 :	Jumlah Tenaga Non PNS.....	73
Tabel 6:	Sarana dan Prasaran	75
Tabel7 :	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konsep	45
Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Wajo	51
Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Wajo.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa, pemuda selalu mengambil bagian penting di dalamnya. Pemuda adalah pelopor perubahan dimanapun berada. Peran pemuda adalah penentu sejarah perjalanan suatu bangsa. Sejarah Indonesia telah membuktikan peran pemuda tersebut. Era Kebangkitan, masa revolusi fisik 1945, masa revolusi, reformasi sebagai titik-titik kegemilangan sejarah pemuda.

Fakta Karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol adalah Energik, Dnamis, Kreatif dan Inovatif. Ada beberapa potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda, antara lain, berani, kuat secara fisik, komunikasi dan jaringan luas, pemikiran yg belum terkontaminas (idealis), kreativitas yang semangat dan pantang menyerah, dan punya jiwa kepeloporan. Potensi ini sejatinya memang ada dan haruslah ada dalam *soul and*



live nya seorang pemuda. Hal-hal inilah yang membuat pemuda selalu tampil terdepan sebagai agen perubahan di nusantara ini sejak dahulu kala.

Namun, sampai saat ini pemuda Indonesia masih diliputi oleh persoalan yang sangat kompleks. Sebagian dari mereka masih buta huruf, tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki akses pada pekerjaan. Sebagian lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas serta terlibat dalam berbagai tindak kriminal dan berbagai persoalan sosial lainnya. Disisi lain, beberapa peristiwa tindak kekerasan seperti demo anarkis atau tawuran antar mahasiswa telah mencoreng wajah pergerakan mahasiswa dan pemuda. Banyak masyarakat merasa kecewa dan antipati dengan pola gerakan mahasiswa-pemuda yang cenderung anarkis dan mengganggu kepentingan umum. Sebagian lagi, aktifis pemuda telah tersubordinasi oleh kekuatan lain sehingga pemuda tidak dapat mengaktualisasikan potensi dan jati dirinya.

Menurut data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah pemuda dunia saat ini telah mencapai angka 1 miliar, dan 85% berada di negara-negara berkembang. Sekitar 60% di antaranya berada di Asia termasuk Indonesia, dan 15% di Afrika dengan tingkat kemiskinan yang

tidak tersedianya kesempatan kerja yang layak (*decent work*).

International Labor Organization (ILO) memperkirakan secara global terdapat



88,2 juta pemuda tidak mendapat pekerjaan lagi atau 47% dari 186 juta total pengangguran dunia.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Kabupaten Wajo merupakan suatu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dimana hal ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah kabupaten untuk selalu dapat berperan aktif terhadap berbagai pemberdayaan yang ada, utamanya pemberdayaan bidang kepemudaan. Seperti yang diuraikan pada awal tadi bahwa pemuda merupakan pilar yang sangat penting dalam satu bangunan fungsi pemerintah kabupaten, hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata “dikesampingkan” realitas keadaan pemuda yang ada di Kabupaten Wajo terjadi kecenderungan bersifat anarkis. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya suatu sistem dimana pemerintah kabupaten dalam hal pemberdayaan/perhatian terhadap bidang kepemudaan yang semakin melemah.



Desa Pattirolokka Kecamatan Keera merupakan salah satu desa yang Kabupaten Wajo, menurut pengamatan penulis berkaitan dengan

pemuda, desa ini sering terjadi perkelahian antar kelompok pemuda bahkan berujung pada perkelahian antar kampung. Kondisi psikologis akibat pengangguran menyebabkan pemuda desa banyak yang mengonsumsi minuman keras, bahkan terlihat banyak *geng* pemuda yang sangat berpotensi terjadi perkelahian, hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan undang-undang tentang pemuda, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan pemuda untuk mencegah hal-hal yang demikian, dari sini penulis melihat peran dari pemerintah kabupaten belum nampak padahal undang-undang jelas mengamanatkan peran pemerintah daerah itu harus Nampak melalui strategi yang tepat yakni suatu pemberdayaan, pemberdayaan pemuda sendiri menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6 adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan pasal 13 menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemuda.

Masalah pokok penelitian ini adalah kurang berperannya pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo yang dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi sebagaimana uraian di atas, potensi kepemudaan yang harusnya diarahkan atau diorientasikan kepada hal-hal yang lebih produktif, namun karena ruang kreatifitas, inovasi dan ruang

pemberdayaan yang masih kurang sehingga realitas kepemudaan yang cenderung destruktif.



Padahal, jika dilihat dari sudut pandang potensi kepemudaan yang ada di Kabupaten Wajo, sangat besar dan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun dan memajukan daerah, khususnya di sektor pemberdayaan kepemudaan. Dalam hal ini, letak persoalan yang fundamental adalah sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo dapat konsisten di dalam menjalankan program pemberdayaan pemuda sebagaimana termaktub di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Hal tersebut, mau tidak mau harus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo sebagai tanggungjawab konstitusional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, yang telah undang-undang amanahkan.

Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani bermacam-macam harapan , terutama dari generasi lainnya.hal ini dapt dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus , generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus, (Sumodiningrat, G. 1999). Adapun potensi potensi pemuda yakni:

- a. Idealis dan daya kritis: Secara sosiologis generasi muda belum mapan

alam tatanan yang ada, maka ia dapat melihat kekurangan-
kekurangan dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari gagasan
baru.



- b. Dinamika dan Kreatifitas.
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Optimis dan kegairahan semangat
- e. Sikap kemandirian dan disiplin murni
- f. Terdidik
- g. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan.
- h. Patriotismedan nasionalisme
- i. Sikap kesatria
- j. Kemampuan kekuasaan ilmu dan teknologi.

Pemuda juga ialah golongan manusia manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung, pemuda di Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda. Proses kehidupan yang dialami oleh para pemuda Indonesia tiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat membawa pengaruh yang besar pula dalam membina sikap untuk dapat hidup dimasyarakat. Proses demikian itu bisa disebut dengan istilah

si, proses sosialisasi itu berlangsung sejak anak ada di dunia dan an berproses hingga mencapai titik kulminasi. Jadi jelaslah sekarang an pemuda Indonesia dilihat dari kesempatan pendidikannya serta



dihubungkan dengan keragaman penduduk dalam suatu wilayah, maka proses sosialisasi yang dialami oleh para pemuda sangat rumit.

Sehubungan dengan perkembangan individu pemuda itu sendiri dan dalam rangka melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua, maka pengalaman-pengalaman yang dialainya itu kadang membingungkan dirinya sendiri. Pemuda Indonesia Pemuda dalam pengertian adalah manusia-manusia muda, akan tetapi di Indonesia ini sehubungan dengan adanya program pembinaan generasi muda pengertian pemuda diperinci dan tersurat dengan pasti.

Akan tetapi, apabila melihat peran pemuda sehubungan dengan pembangunan, peran itu dibedakan menjadi dua yaitu 1. Didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan lingkungan. Pemuda dalam hal ini dapat berperan sebagai penerus tradisi dengan jalan menaati tradisi yang berlaku 2. Didasarkan atas usaha menolak menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Peran pemuda jenis ini dapat dirinci dalam tiga sikap, yaitu : pertama jenis pemuda “pembangkit” mereka adalah pengurai atau pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial. Mereka secara tidak langsung untuk mengubah masyarakat dan kebudayaan. Kedua pemuda pdelinkeun atau pemuda nakal.

tidak berniat mengadakan perubahan, baik budaya maupun pada kat, tetapi hanya berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat melakukan tidnakan menguntungkan bagi dirinya, sekalipun dalam



kenyataannya merugikan. Ketiga, pemuda radikal. Mereka berkeinginan besar untuk mengubah masyarakat dan kebudayaan lewat cara-cara radikal, revolusioner. Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai mahluk moral, mahluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi.

Selaku Pemuda kita dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran pemuda sangat dinantikan untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak.

Oleh karena itu, potensi kepemudaan yang ada di Kabupaten Wajo seperti, banyaknya Komunitas Motor (*Bikers*) yang aktif melaksanakan subuh berjamaah di masjid dan setelah selesai sholat, melanjutkan agenda social yakni, bekerja bakti membersihkan masjid dan lingkungan sosial, kemudian aktivitas pemuda yang bergerak dibidang UMKM dalam melestarikan kearifan local seperti *Kain Sutra* yang dikenal oleh daerah lain sebagai icon daerah Kabupaten Wajo, perkembangan industry caffe, merupakan potensi daerah yang harusnya diapresiasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo untuk mengarahkan pemuda

h mengembangkan potensi tersebut.

ehingga, sinergitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten bersama organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) seperti Komite



Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hiperमawa) dan para pemuda yang bergerak dibidang UMKM lainnya, menjadi penting untuk dibangun ke depannya.

Guna memperoleh strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pemberdayaan dibidang kepemudaan, maka diperlukan data dan informasi untuk menggambarkan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dan implementasi pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusun Proposal dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda (Studi Kasus; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo).

B. Rumusan Masalah

Pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo ditentukan oleh strategi dan implementasi kebijakan yang ditempu oleh Pemerintah, khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo dalam pemberdayaan pemuda?

Faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasi strategi pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo.



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis, strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo dalam pemberdayaan pemuda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten Wajo secara khusus.
2. Manfaat Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, yang berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dalam dimensi pemberdayaan pemuda.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Tinjauan Pembangunan Wilayah dan Kebijakan Pemberdayaan

a. Pengertian Pembangunan Wilayah

Apa yang telah, sedang dilakukan pemerintah secara umum adalah bagian dari pembangunan wilayah, hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Todaro bahwa Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengaruh kesenjangan dan pemberantasa kemiskinan (Todaro, 2000).

Pembangunan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan factor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluan dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan

baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya



teknologi, sedangkan factor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring terjadinya interaksi dengan wilayah lain.

Menurut Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan bahwa pembangunan adalah Sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, sebagai usaha yang telah dilakukan pemerintah. Menelaan pembangunan dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah. Seperti diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedomannya.

Menurut Purwoko (dalam Yuwono 2001:54) mengemukakan terdapat tiga pembangunan masyarakat yakni yang pertama, Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat interpretasi pembangunan masyarakat yang demikian merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti kesehatan gizi, sanitasi, dan sebagainya yang diseluruhan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial



yang kompleks bervariasi. Di banyak Negara pembangunan masyarakat diartikan sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih sublime dan sukar diukur seperti, keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian pikiran dan sebagainya. Ketiga, Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Anggapan dasar dari interpretasi pembangunan yang demikian adalah manusia dan bukan ekonomi dan teknologi yang menjadi focus dan sumber pembangunan utama. Kehendak, komitmen dan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat merupakan sumber-sumber pembangunan yang strategi.

Pada hakekatnya pembangunan wilayah bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari sisi materi maupun non materi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan wilayah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

b. Kebijakan Pemberdayaan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai kebijakan pemberdayaan, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,



dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno (2004:19) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Pengertian ini mengandung arti bahwa disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjamin dan pertanyaan tertulis baik yang dikeluarkan pemerintah, partai politik dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dengan kebijakan.

Abdul Wahab Solichin (2008: 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi saling pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- (a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,
- (b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,
- (c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,
- (d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,
- (e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,
- (f) Setiap



kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit, (g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, (h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi, (i) Kebijakan public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, (j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pada pedoman-pedoman yang telah disebutkan oleh Abdul Wahab Solichin (2008: 40:50) menandakan bahwa kebijakan bukanlah suatu hal yang cukup mudah namun juga tidaklah menandakan kerumitan didalamnya. Pemahaman yang tepat tentang kebijakan akan melahirkan diskresi yang tepat dalam menangani sebuah masalah.

Bahwa setiap Negara pada dasarnya menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah respon mereka terhadap masalah tersebut disebut dalam wacana kita dipahami sebagai kebijakan public. (Nugroho R. (2014; 99)

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor an set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau



sekelompok pelaku guna memecah suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Rudi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternative yang ada.

Menurut Nugroho Riant (2014; 2) pertanyaan genting sepanjang zaman adalah bagaimana kita membuat pemerintah kita efektif? Artinya pemerintah yang member hasil. Riant Nugroho kemudian melanjutkan bahwa dari berbagai penelitian dan pengalaman, ternyata pemerintah yang efektif tidak pertama-tama ditentukan oleh pemimpin yang baik hati, jujur, dan seterusnya. Memang, penting, tetapi yang lebih penting adalah apakah pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik? Menurut sebagian kalau tidak hendak dikatakan sebagai besar pemerintah, tidak terkecuali di Negara maju apalagi di Negara berkembang, banyak membuat kebijakan yang menyedihkan rakyat, dan akhirnya menyengsarakan.

Nugroho kemudian menyebutkan dua penyebab dari kegagalan pemerintah membangun kebijakan publik yang hebat atau unggul. Pertama, karena tidak mengerti makna dan substansi kebijakan public. Kedua, ketidakmampuan memahami dan tidak mengertian ini bukan dominasi para praktisi pemerintahan,



namun juga dikalangan akademisi. Karena itu ancaman yang mungkin muncul adalah kemiskinan teori kebijakan publik. Kedua, karena analisis kebijakan tidak ada, ada tetapi tidak bekerja dengan baik, dan walaupun sudah bekerja dengan tidak mampu menghasilkan kebijakan yang hebat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 1999) ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai

asukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.



Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity).



Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 1999) ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali

kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam



merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

c. Pengertian Pemberdayaan

Dalam ranah pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah yang baru melainkan sudah sering diekspresikan semenjak adanya kesadaran bahwa manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Untuk menghayati peranan pendidikan memberdayakan sumber daya manusia, lebih dulu kita melihat apa sebenarnya pemberdayaan itu.

Daryanto (2009: 1) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang

akan membawa masyarakat menuju suatu berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.



Nasdian (2014; 89) dalam bukunya pengembangan masyarakat menyatakan bahwa Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan ditingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dalam kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, semua stakeholders sebagai pelaku perubahan dalam proses pembangunan berupaya memberdayakan warga komunitas (dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya) baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok siswa, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan yang baik.

Dalam hal lain, Nasdian menyatakan bahwa pemberdayaan (empowerment) ditujukan untuk “membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya” Payne, (1979) dalam Nasdian (2014; 89-90).

Pandangan lain dalam mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan unyuk membentuk masa depan



sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk diri kedepannya. (Nasdian 2014; 90).

Pendapatan di atas menunjukkan bahwa Pemberdayaan (empowerment) bukan hanya memberikan kesempatan rakyat mengguna sumber daya dan biaya pembanguan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang lebih baik.

Menurut Suharto Edi (2009: 57) pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjukkan kepada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- a. “Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bias diciptakan kelompok itu sendiri atau melalui fasilitas pemerintah.



- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang, jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka”.

Proses pemberdayaan (empowering process) khususnya pemberdayaan pemuda sangatlah penting agar pemuda ini dapat memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan dan bertanggung jawab sehingga tidak akan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemuda diharapkan pemuda akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dapat dipahami bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindak-tindakannya.

Risyanti R. (2006: 2) mengemukakan bahwa terkait dengan kegiatan pemberdayaan pemuda, maka hal ini merupakan suatu perencanaan yang harus dilaksanakan. Konsep pemberdayaan sangat berkaitan dengan kegiatan yang membebaskan seseorang dari pemikiran yang kaku karena terkait oleh ketidakpahaman terhadap



apa yang hendak diperbuat, dan hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengandung pendidikan dan sosial.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama menurut Oakley dan Marsden dalam Adimiharja Kusnaka (2008/11, 16), mengemukakan bahwa pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan dan kemampuan pada masyarakat agar lebih berdaya, proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi, hal ini merupakan kecenderungan primer, kedua menurut Pranarka dan Vindhyanika dalam Adimiharja Kusnaka (2001; 16), menyatakan bahwa pemberdayaan yang merupakan kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau, memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Nasdian (2014; 103-104) Sampai sejauh ini pemberdayaan belum mempunyai bentuk yang baku. Meskipun demikian, sebagai tindakan awal dapat dimulai dengan upaya yang akan agak berbaur

argon dan retorik, dengan tujuan menyadarkan warga komunitas akan hak dan kewajibannya. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya membentuk suatu lembaga dan berbasis moral dan aktif



menampung kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan kekuatan warga komunitas yang kemudian dimanifestasikan dalam aksi pengembangan masyarakat yang konkrit. Dengan mempertimbangkan aspek ini, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi akan bermakna penting, kehidupan warga komunitas akan semakin kokoh, dan tidak rentan terhadap kebijakan eksternal yang cenderung merugikan warga komunitas. Upaya seperti ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang bias terhadap masyarakat lokal dan masyarakat komunitas.

Pemberdayaan pemuda ini hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki sehingga proses pemberdayaan dapat diberjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemberdayaan yang tidak berdasarkan pada permasalahan hanya akan menambah beratnya masalah yang sedang dihadapi. Banyak dari kalangan pemerhati bahkan penentu kebijakan pemberdayaan telah mencoba untuk mengobati berbagai penyakit yang sedang diderita oleh pemuda akan tetapi sampai hari ini masalah yang dihadapi terkesan berputar diporos yang sama dalam artian tidak mengalami perubahan ataupun penyelesaian masalah yang tepat.



d. Arah dan Kebijakan Undang-undang Pemberdayaan Kepemudaan

Posisi ditempati oleh paling strategis pemuda, baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerus pembangunan dimasa dating. Sebagaimana pemuda adalah symbol dari idealisme, semangat dan cita-cita sebuah bangsa. Harapan dan tulang punggung bangsa dimana tidak lain adalah pemuda.

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berupaya untuk mewujudkan visi pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berdaya saing dalam lingkungan kepemudaan diartikan “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan dan pelatihan. Termasuk pemagangan, pembimbingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga

apat mencapai hasil yang maksimal. Pengembangan tersebut menciptakan nilai tambah kepemudaan diberbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda



Indonesia dikanca kompetisi global. (Penyajian Data dan Informasi
Kepemudaan dan Keolahragaan, 2014; 3)

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang
Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 (Pasal 9 dan 13) Tentang
Kepemudaan, bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya
pemberdayaan. Sedangkan pada pasal 7 dan pasal 8, pelayanan
kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotism, dinamika,
budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan
partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya,
masyarakat, bangsa, dan Negara. Sedangkan pada pasal 8,
disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela
Negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan
memperoleng peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi,
beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan
peningkatan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader

pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang
butuhkan lingkungannya.



Esensi pemberdayaan pemuda sebagaimana Pasal 24 dan 25 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda, dengan melalui peningkatan iman dan taqwa; peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggara pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional; peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggara penelitian dan pendamping kegiatan kepemudaan.

Pasal 3 Undang-Undang Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan



potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda”. Ketersediaan dan Kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan dan menyediakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang adalah patut dilaksanakan.

Berbagai program yang diciptakan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan pemuda mengharuskan memandirikan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan baik dari segi nalar maupun mental. Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki pemuda diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana, tetapi meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat pemuda makin berdaya.

Nasdian dalam bukunya pengembangan masyarakat mengatakan bahwa walaupun pemberdayaan secara politis belum memiliki bentuk yang baku, tetapi sebagai tindakan awal dapat dimulai dengan upaya yang agak “retorik” yaitu menyadarkan warga komunitas lapisan bahwa akan hak dan kewajiban. Strategi tersebut

perlu dilengkapi akan upaya membentuk suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan dan aspirasi warga komunitas lapisan bawah. Dengan mempertimbangkan aspek politik



ini, pemberdayaan dapat bermakna dengan lebih luas dan yang penting, kehidupan warga komunitas lapisan bawah tidak rentan lagi terhadap berbagai guncangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah local yang selama ini selalu biasa terhadap warga komunitas lapisan bawah. (Nasdian, 2014; 101-102).

Person et.al, menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti yang mengaitkan seseorang dengan sumber atau system lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas



kehidupan. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

2. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan serta sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas, Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi system besar memandang klien sebagai orang yang dimiliki kompetensi yang dimiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Suharto Edi. 2005;30).



2. Tinjauan Pemberdayaan Pemuda

Keberdayaan pemuda tidak lahir begitu saja, ada proses yang tentunya diawali oleh sebuah strategi bagaimana memberdayakan. Seperti yang dikutip (T.R Andi Lolo 2016) bahwa dalam memberdayakan itu ada tiga fase yaitu, pencerahan, (enlightment) adalah membuka wawasan masyarakat tentang pengetahuan, pemahaman, cara pandang baru yang bersifat membangun atau member suatu pelajaran terhadap suatu hal, kedua, pengayaan (enrichment) adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk tindakan untuk mendapatkan suatu informasi dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki, kemudian ketiga, pemberdayaan (empowerment) adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara member dorongan, peluang, kesempatan untuk mengembangkan dan melanjutkan potensinya sehingga masyarakat mengalami peningkatan dan aktualisasi diri melalui berbagai aktivitas.

a. Pengertian Pemuda dan Kondisi Umum Pemuda

Pemuda adalah asset bangsa, baik buruknya suatu bangsa masa yang akan datang dapat kita lihat dari seberapa baik kualitas pemuda saat ini. Abdul Syukur yang mengungkapkan bahwa pemuda



adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun, yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energy, semangat dan kreatif untuk mencipkakan semangat pembeharuan. Meski berbeda dari segi usia tetapi tidaklah menciptakan perbedaan substansi didalamnya (Abidin Yunus. 2016: 50).

Pemuda dalam takaran Anis Baswedan mengatakan bahwa pemuda, memiliki tiga peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pertama, sebagai generasi penerus yang konsisten melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Kedua, sebagai generasi pengganti untuk menggantikan para generasi tua yang belum mampumengamban amanat. Ketiga, sebagai generasi pembeharu yang bersungguh-sungguh berjuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa (Abidin Yunus. 2016:51).

Kemajuan dan kemunduran bangsa Indonesia tidak terlepas dari pemuda dalam mengisi pembangunan dimasa kemerdekaan saat ini. Bangsa Indonesia sendiri bukanlah bangsa yang miskin dan terbelakang akan tetapi merupakan suatu bangsa yang besar dan memiliki cita peradaban yang tinggi. Pada masa lampau, Indonesia

perna mengalami masa kejayaan dan keemasan, didunia internasional melalui kerajaan maritime yang tangguh. Banyak bukti-bukti yang menunjukan bahwa peradaban bangsa Indonesia sangat tinggi seperti



adanya bangunan bersejarah, karya tulis dan system kearifan local yang diwariskan secara turun temurun. Dulu kita percaya sekali bahwa tiga modal dasar yang dipunyai Ionesia seperti wilayah yang luas, melimpahnya sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, akan membawa bangsa kita menjadi makmur dan sejahtera. Tetapi ternyata semuanya itu tidak terbukti. Bahkan kalau kita melihat bangsa-bangsa “liliput” yang tidak memiliki criteria tersebut, contohnya Singapura dan Hongkong bias menjadi Negara maju yang dipandang dunia. Korea Selatan, Jepang, New Zealand misalnya adalah Negara-Negara yang terkenal dengan kriminalitasnya yang rendah dan ternyata merupakan Negara-negara maju dengan karakter masyarakat yang terkenal mempunyai etos kerja tinggi (Megawangi, Ratna 2004; 21).

b. Isu-Isu Pemerdayaan Pemuda

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama, sebab kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya.

Kehebatan tekhnologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa.



Menurut Nasdian dalam bukunya pengembangan masyarakat, faktir-faktor yang menghambat pemberdayaan dan partisipasi serta menjadi penyebab mengapa masyarakat lapisan bawah ditingkat komunitas tidak berdaya menghadapi lapisan yang lebih kuat, perlu dicermati dan diperhatikan dengan baik meskipun program pengembangan masyarakat berpotensi membedayakan lapisan bawah, tetapi potensinya tidak dapat diaktualisasikan dengan baik karena masalah structural. Masalah structural tersebut mengalahkan masyarakat lapisan bawah terhadap interes pribadi aparatur pemerintah yang lebih kuat. Selain itu, mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta kordiansi antar lembaga juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pemerintah local terjebak dalam perencangan program pemberdayaan masyarakat yang kaku. (Nasdian, 2014; 101).

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini kearah yang lebih baik, adalah bangsa partisipasi aktif aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat. Pembanguna masyarakat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan defenisi yang dikeluarkan oleh PBB tersebut, setidaknya ada dua peran pemuda dalam kaitanya dengan upaya



pembangunan masyarakat. Pertama, pemuda sebagai pemeriksa dari sekelompok masyarakat bersama-sama dengan mereka melakukan upaya memperbaiki kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, pemuda bertindak sebagai fasilitator dari program-program yang digulirkan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat. (Wahyu. 2009;4).

Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola dengan oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralism yang ada di Indonesia bias menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan. (<http://sinergibangsa.org/pemuda-dan-problematika-kebangsaan/>).

3. Tinjauan Manajemen Strategik

a. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai



penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin,



keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin.

b. Analisi SWOT

. Definisi SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat)

SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Kottler (2009: 63) memberikan kesimpulan mengenai SWOT:

1. Kekuatan (Strength) a. Pengalaman dan pandangan industri yang mendalam b. Desainer produk yang kreatif tetapi praktis c. Penggunaan model bisnis yang sangat efisien dan fleksibel dengan memanfaatkan penjualan dan distribusi pelanggan langsung.

2. Kelemahan (Weakness) a. Ketergantungan terhadap modal luar yang diperlukan untuk menumbuhkan bisnis. b. Kurangnya pengecer yang dapat bekerja tatap muka dengan pelanggan untuk menghasilkan kesadaran merek dan produk. c. Kesulitan mengembangkan kesadaran merek (brand awareness) sebagai

perusahaan yang baru berdiri.

3. Peluang (Opportunity) a. Partisipasi dalam industri yang sedang tumbuh b. Penurunan biaya produk melalui skala



keekonomisan c. Kemampuan untuk mendongkrak usaha pemasaran peserta industri lain untuk membantu menumbuhkan pasar umum. 15

4. Ancaman (Threat) a. Persaingan masa depan/potensial dari peserta pasar yang sudah mapan b. Penurunan ekonomi yang bisa memberi dampak negatif pada pengeluaran orang dari pendapatan bebas untuk produk kebugaran/rekreasional c. Peluncuran hasil studi yang mempertanyakan keamanan berseluncur atau ketidakmampuan kita mencegah trauma besar yang diakibatkan berseluncur

Rangkuti (2013: 19) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

B. Tinjauan Empiris

Pada bagian ini, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bagian dari referensi dalam penelitian ini. Tinjauan



empiris yang disajikan merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan cukup mengena terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat menjadi patron bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Chuncoro, M. Eko Wahyu. 2011 “Pemberdayaan Pemuda pengangguran Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup (Life skills) Ternak Kelinci di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Pemuda Pengangguran melalui Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skills) Ternak Kelinci di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Dan apa Out Put dan Out Come setelah mengikuti pelaksanaan Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skills) Ternak Kelinci di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui pelatihan kecakapan hidup (life Skills) ternak kelinci para pemuda mempunyai keterampilan dan pengetahuan tentang ternak kelinci, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan cara merintis usaha beternak kelinci dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi

dirinya sendiri. Meningkatkan taraf ekonomi pemuda yang mengikuti pelatihan.



Yusuf, Muh (2016) Meneliti Pemberdayaan Generasi Muda Dibidang Kepemimpinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode proses wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto, memberdayakan hanya sebagian aparatur muda, sejauh ini pemerintah belum membuat kebijakan spesifik dalam memberdayakan generasi muda. Penegembangan yang diberikan bersifat umum, seperti pelatihan fungsional, pelatihan structural, diklatpim, dan pengembangan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pada tahun 2014 pemerintah daerah mulai menempatkan generasi muda dalam berbagai jabatan structural baik pada esalon III-a, IV-a maupun IV-b. Kepemimpinan generasi muda mulai membawa suasana baru pada lingkup birokrasi pemerintahan Kabupaten Jeneponto, aparatur muda dinilai lebih energik dan memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih. Pemberdayaan aparatur muda, didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik bersifat internal, seperti: penilaian karir, prestasi individu, semangat kerja, penguasaan individu terhadap pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan dan kreativitas dan inovasi.

elain itu adapula pertimbangan eksternal, yaitu; latar belakang individu, kedekatan individu dengan pucuk pimpinan dan komunikasi individu yang cukup baik.



Senna, A. Meggie (2016) melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dalam Berwirausaha Melalui Ekonomi Kreatif di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan yakni; mengetahui proses pemberdayaan pemuda dalam usaha kuliner; dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan pemuda dalam usaha kuliner di Kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam kreativitas dan pemberdayaan pemuda telah dilakukan seperti pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki program tahunan bernama Palopo youth fest, Program pemerintah Kota Palopo, yaitu KHILAN (Kelompok Homer Industry Unggulan), peran organisasi HIPMI, KNPI, CREACLE, Forum Positif dan Pengusaha muda mandiri melakukan proses pemasaran. Faktor internal yaitu pengadilan diri yang kurang baik, sumber daya kewirausahaan, sedangkan faktor eksternal yaitu persaingan pasara ketat, harga bahan baku yang tidak stabil dan masih kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda kewirausahaan melalui ekonomi kreatif khususnya dibidang kuliner.



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini membatasi penelitian pada pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahrag (Dispora) sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberdayaan pemuda menurut Undang-undang Kepemudaan No. 40. Tahun 2009 adalah membangkitkan peran dan potensi pemuda. Pemberdayaan pemuda tentu mengalami tantangan dan peluang dalam implementasinya. Adapun Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahrag Kabupaten Wajo 2014-2019, sebagai berikut; (1) Mewujudkan pencitraan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, (2) Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, (3) Mewujudkan pemuda berkarakter religius, berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader melalui karakteristik pemuda, (4) Mengembangkan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan dan kepemimpinan, kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang

embangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan
epanduan/kepramukaan sebagai pengkaderan calon pemimpin
angsa, (5) Meningkatkan kemasyarakatan peyadaran pemuda



melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kreatifitas keilmuan, kreatifitas berorganisasi pemuda, (6) Meningkatkan potensi sumber daya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemnerintahan dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat luas, (7) Mewujudkan olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional, internasional melalui peningkatan dan potensi olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan serta pemanfaatan lptek olahraga modern.

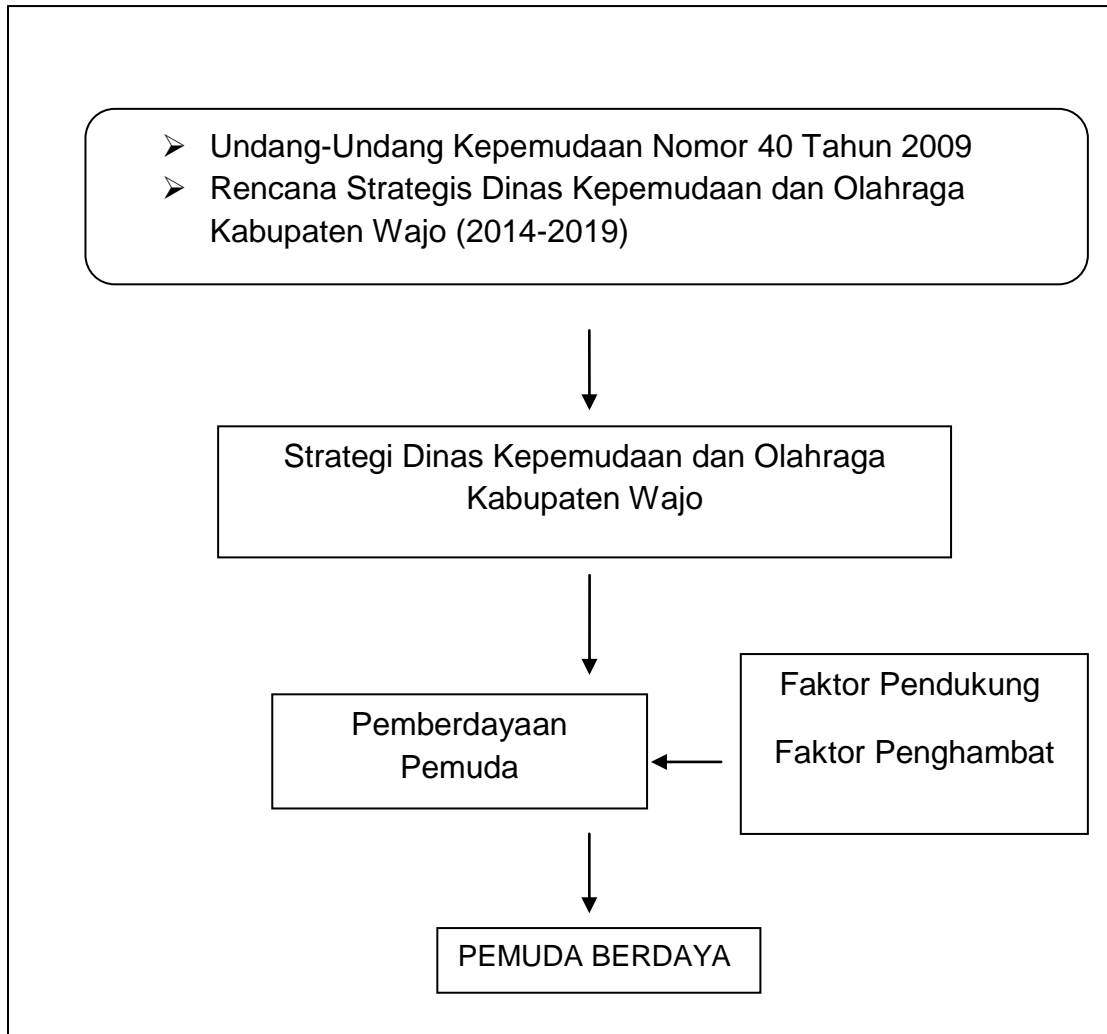
Berdasarkan rencana strategi yang telah diurutkan diatas diharapkan menjaadi poin penting dalam implementasi memperdayakan pemuda dikemudian hari.

Dari hasil analisa tersebut diidentifikasi kondisi sarana dan prasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo, program pemberdayaan pemuda serta factor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan baik factor internal maupun eksternal. Dalam bentuk bagan kerangka pemikiran dapat dilihat

sebagai berikut;



Gambar 1 Konsep Kerangka Pemikiran



(Sumber; Penulis 2018)

